HUKUM ACARA PIDANA

Pengadilan Tinggi tidak berwenang memutus perkara dalam tingkat banding yang termasuk wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-4-1971 No. 156 K/Kr/1969

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi di Medan tanggal 21 September 1968 No. 52/1968/ KE , dalam putusan mana terdakwa :

R. Soetarmín, umur kira-kira 42 tahun, lahir di Purworejo (Jawa Tengah), bertempat tinggal terakhir di Sei Sikambang C. II Medan, pekerjaan Direktur PT Embun Emas ;

penuntut-kasasi (berada diluar tahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh :

"Bahwa dia tertuduh pada tanggal 3 Januari 1967 atau pada hari lain dalam bulan Januari 1967 di Belawan ataupun salah satu tempat daerah hukum Pengadilan Ekonomi di Medan, wilayah propinsi Sumatera Utara, dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang tidak memberitahukan kepada pegawai Jawatan Bea Cukai Belawan, jumlah yang sebenarnya dari kopi biji yang hendak dikirim keluar negeri, yakni luar daerah pabean Belawan yaitu, tertuduh dalam memberitahukan muat barang atau PMB bertanggal 3 Januari 1967 No. 19/CH/IPB telah memberitahukan bahwa biji kopi yang akan dikirim keluar negeri itu adalah berjumlah 187.068 Kg. Netto, sedangkan sewaktu dilakukan penimbangan semuanya berjumlah 193.035,5 Kg. Netto, sehingga dengan demikian berselisih 5.967,5 Kg. lebih dari pada yang diberitahukan oleh ia tertuduh kepada Pegawai Jawatan Bea dan Cukai Belawan tersebut" ;

"Bahwa ia tertuduh, pada tanggal 13 Pebruari 1967, ataupun pada hari lain dalam bulan Pebruari 1967, di Belawan ataupun disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ekonomi Medan, Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan sengaja atau dengan kelalaian tidak memberitahukan kepada pegawai Bea dan Cukai di Belawan, jumlah yang sebenarnya dari biji kopi yang hendak dikirimkannya keluar negeri, yakni keluar dari daerah pabean Belawan yaitu dia tertuduh dalam pemberitahuan pemuatan barang atau PMB tertanggal 13 Pebruari 1967 No. 40/ CH/IPB telah memberitahukan bahwa biji kopi yang

akan dikirimkannya keluar negeri itu 100.000 Kg. Netto sedangkan setelah dilakukan penimbangan oleh pegawai Bea Cukai Belawan ternyata berjumlah 111.100 Kg. sehingga dengan demikian berselisih 11.100 Kg. lebih dari pada yang diberitahukan oleh dia tertuduh dalam pemberitahuan pembuatan barang PMB tersebut diatas” ;

“Bahwa ia tertuduh, pada tanggal 2 Mei 1967, ataupun pada hari lain dalam bulan Mei 1967, di Belawan atau disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ekonomi di Medan, Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memberitahukan kepada pegawai Jawatan Bea dan Cukai di Belawan timbangan yang sebenarnya dari jahe yang hendak dikirim keluar negeri dalam pemberitahuan barang (PMB) tertanggal 5 bulan 2 1967 No. 78/CH IPB telah memberitahukan akan jahe yang akan dikirimkannya itu berjumlah 45.500 Kg. sedangkan sewaktu dilakukan penimbangan oleh pegawai Bea dan Cukai Jawatan di Belawan, ternyata semuanya berjumlah 48.154,75 Kg. sehingga dengan demikian berselisih 2.654,75 Kg. dari yang diberitahukan tertuduh kepada Pegawai Bea dan Cukai dengan pemberitahuan muat barang (PMB) tersebut diatas” ;

dengan memperhatikan pasal-pasal 25, 26, 26b. dari Reglement Ordonnantie jo. Undang-Undang Darurat No. 9/1958 dan pasal-pasal 1, 10, 14a, 30 dan 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 9/1950 Bab II HIR , telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Menerangkan, bahwa pesakitan, yang lebih lanjut tersebut diatas ini :
R. Soetarmin,

telah bersalah melakukan kejahatan :

“Tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan yang sebenarnya dalam pemberitahuan umum sewaktu mengexport barang-barang hasil bumi dalam negeri sewaktu hendak diexport keluar negeri”;

kejahatan mana dapat diancam dan dirumuskan dalam fatisal-fatisal: 25, 26, 26b dari RO jo. Undang-Undang Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 8/1958 ;

Menghukum dia oleh karena sedemikian dengan hukuman penjara lamanya 1 (satu) bulan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan 3 (tiga) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum, dan didenda sebesar Rp. 25.000.-- (Dua puluh lima ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;

Memerintahkan supaya sesudahnya persidangan ditutup, barang-barang bukti dalam perkara ini dilampirkan dalam berkas :

Menghukum pesakitan lagi menanggung membayar biaya perkara ini”;

putusan mana dalam pemeriksaan dalam tingkat banding telah diperbaiki oleh

Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 26 Juni 1969 No. 4/69/PTE yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan banding dari Jaksa tersebut diatas ;
Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Medan, tertanggal 21 September 1968 No. 52/1968/KE yang dibanding sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan ;

Menghukum tertuduh dengan hukuman penjara selama : 3 (Tiga) Bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika jumlah uang tersebut tidak dibayar oleh tertuduh diganti dengan hukuman kurungan buat lamanya : 3 (tiga) Bulan ;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya ;

Menghukum lagi tertuduh membayar ongkos perkara ditingkat banding ini" ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 1969 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Medan, 22 September 1969 dari Sjarief Siregar, SH untuk dan atas nama penuntut-kasasi berdasarkan surat-kuasa tertanggal Medan, 17 September 1969 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 1969 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 13 Januari 1971 No. 144/1969 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 15 September 1969 dan penuntut-

kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 1969 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 22 September 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah dimasukkan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak menguraikan dasar hukum tentang tidak sependapatnya Jaksa Agung terhadap keputusan Pengadilan Ekonomi ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi tidak menguraikan atas dasar-dasar hukum tentang beratnya hukuman ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan penuntut-kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan karena :

— bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi yang diadili dalam tingkat pertama oleh Pengadilan Ekonomi Medan, kemudian terhadap putusan tersebut Jaksa banding-;

— bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi telah memutus perkara tersebut padahal perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi -;

— bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi telah memutus perkara ini dalam tingkat banding pada hal bukan wewenangnya -;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam tingkat banding harus diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Ekonomi Medan untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan :

MEMUTUSKAN :
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juni 1969 No. 4/69/PTE ;

Memerintahkan Pengadilan Tinggi di Medan mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Ekonomi Medan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding setelah mana dapat diajukan permohonan kasasi lagi ;

Menunda keputusan tentang biaya perkara sampai putusan terakhir dalam perkara ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 1971, oleh Prof. Subekti, SH Ketua, Busthanul Arifin, SH dan Indroharto, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 28 April 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. Hakim-hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Fatimah Siregar, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 4/69/PTE

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN,

memberi keadilan dalam perkara-perkara kejahatan dalam sidang Permusyawaratan, telah memberi keputusan sebagai berikut dalam perkaranya tertuduh :

R. Soetarmin, umur 42 tahun, lahir di Purworejo (Jawa Tengah), pekerjaan Direktur PT Embun Emas, tempat tinggal di Kampung Sei Sikambang C. II Medan ;
(Pesakitan berada diluar tahanan).

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan serta keputusan Pengadilan Negeri Ekonomi di Medan tanggal 21 September 1968 No. 52/1958/KE , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerangkan, bahwa pesakitan yang lebih lanjut tersebut diatas :

R. Soetarmin, telah bersalah melakukan kejahatan :

"Tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan yang sebenarnya dalam pemberitahuan umum sewaktu mengexport barang-barang hasil bumi dalam negeri sewaktu hendak diexport keluar negeri" ;

Kejahatan mana dapat diancam dan dirumuskan dalam futsal-fatsal : 25, 26, 26b dari Rechten Ordonnantie jo Undang-undang Darurat No. 7/1955 jo Undang-Undang Darurat No. 8/1958 ;

Menghukum dia oleh karena sedemikian dengan hukuman penjara lamanya 1 (satu) bulan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan 3 (tiga) bulan, membuat perbuatan yang boleh dihukum, dan didenda sebesar Rp. 25.000.-- (dua puluh lima ribu rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan :

Memerintahkan supaya sesudahnya persidangan ditutup, barang-barang bukti dalam perkara ini dilampirkan dalam berkas ;

Menghukum pesakitan lagi menanggung membayar biaya perkara ini.

2. Surat catatan yang dibuat oleh Mohd. Bachtiar Piliang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 September 1968, yang menyatakan bahwa Z. Akbar Lubis, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Medan, telah meminta agar perkara ini diperiksa dan diputuskan dalam pemeriksaan ditingkat banding ;

3. Risalah banding yang dimajukan oleh Jaksa tersebut pada tanggal 3 Desember 1968 ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk banding karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan risalah banding tersebut diatas yang isinya secara ringkas adalah sebagai berikut :

Bahwa ia tidak sependapat dengan keputusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 September 1968 No. 52/1968/KE tersebut, dan Jaksa menuntut agar supaya tertuduh dijatuhi hukuman penjara lamanya 1 (satu) tahun ditambah denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Keputusan Pengadilan Negeri pada dasarnya telah tepat dan berdasarkan keadilan serta hukum yang berlaku terkecuali mengenai beratnya hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan adalah sebagai berikut :

Menghukum Tertuduh dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ditambah denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), subsidier 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos perkara yang timbul ditingkat banding ini dibebankan kepada Tertuduh ;

Memperhatikan pasal-pasal 16 s/d 19 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1961 tahun 1964.

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Jaksa tersebut diatas ;

Memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri di Medan, tertanggal 21 September 1968 No. 52/1968/KE yang dibanding sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan ;

Menghukum Tertuduh dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika jumlah uang tersebut tidak dibayar oleh Tertuduh diganti dengan hukuman kurungan buat lamanya 3 (tiga) bulan ;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya ;

Menghukum lagi Tertuduh membayar ongkos perkara ditingkat banding ini ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan, pada hari Selasa tanggal 22 April 1969 oleh Kami Prof. Mahadi, SH Ketua, dengan Djariaman Damanik, SH dan Martias, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1969, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nalomoan Zein Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa dan Tertuduh.

Putusan Pengadilan Ekonomi Medan No. 52/1968/KE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

dari Pengadilan Ekonomi di Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam perkara pesakitan :

R. Soetarmin,

umur 42 tahun, lahir di Purworejo (Jawa Tengah), pekerjaan Direktur PT Embun Emas, tempat tinggal di Kampung Sei Sikambing, C II Medan.

Pesakitan berada diluar tahanan.

PENGADILAN NEGERI EKONOMI tersebut diatas :

Mendengar keterangan-keterangan/pengakuan pesakitan dipersidangan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan diatas sumpah ;

Mendengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan ;

Mendengar pembacaan surat-surat ;

Mendengar pembacaan penuntutan hukum dari Jaksa, dalam mana dia menuntut, oleh sebab kesalahannya pesakitan terhadap tuduhannya terbukti dengan sah dan meyakinkan, supaya pesakitan dihukum dengan hukuman penjara lamanya 1 (satu) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan agar supaya barang bukti dalam perkara ini dilampirkan dalam berkas perkara serta menetapkan lagi supaya ongkos-ongkos perkara dibebankan kepada tertuduh.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan, yang didakwakan pada pesakitan, berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa dia tertuduh pada tanggal 3 Januari 1967 atau pada hari lain dalam bulan Januari 1967 di Belawan ataupun salah satu tempat daerah hukum Pengadilan Ekonomi di Medan, wilayah propinsi Sumatera Utara, dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang tidak memberitahukan kepada pegawai Jawatan Bea Cukai Belawan, jumlah yang sebenarnya dari kopi biji yang hendak dikirim keluar negeri, yakni luar daerah pabean Belawan yaitu, tertuduh dalam memberitahukan muat barang atau PMB bertanggal 3 Januari 1967 No. 19/CH / IPB telah memberitahukan bahwa biji kopi yang akan dikirim keluar negeri itu adalah berjumlah 187.068 Kg Netto, sedangkan sewaktu dilakukan penimbangan semuanya berjumlah 193.035,5 Kg Netto, sehingga dengan demikian berselisih 5.967,5 Kg lebih dari pada yang diberitahukan oleh ia tertuduh kepada Pegawai Jawatan Bea dan Cukai Belawan tersebut.

— Bahwa ia tertuduh, pada tgl. 13 Pebruari 1967, ataupun pada hari lain dalam bulan Pebruari 1967, di Belawan ataupun disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ekonomi Medan, Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan sengaja atau dengan kelalaian tidak memberitahukan kepada pegawai Bea dan Cukai di Belawan, jumlah yang sebenarnya dari biji kopi yang hendak dikirimnya keluar negeri, yakni keluar dari daerah pabean Belawan yaitu dia tertuduh dalam pemberitahuan pemuatan barang atau PMB tertanggal 13 Pebruari 1967 No. 40/ CH/IPB telah memberitahukan bahwa biji kopi yang akan dikirimkannya keluar negeri itu 100.00 Kg. Netto sedangkan setelah dilakukan penimbangan oleh pegawai Bea Cukai Belawan ternyata berjumlah 111.000 Kg sehingga dengan demikian berselisih 11.100 Kg. lebih dari pada yang diberitahukan oleh dia tertuduh dalam pemberitahuan pemuatan barang (PMB) tersebut diatas.

— Bahwa ia tertuduh, pada tgl. 2 Mei 1967, ataupun pada hari lain dalam bulan Mei 1967, di Belawan atau di salah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ekonomi di Medan, Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memberitahukan kepada pegawai Jawatan Bea dan Cukai di Belawan timbangan yang sebenarnya dari jahe yang hendak dikirim keluar negeri yakni keluar daerah pabean Belawan, yaitu ia tertuduh dalam pemberitahuan barang (P.M.B.) tertanggal 5 bulan 2 1967 No. 78/ CH/IPB telah memberitahukan akan jahe yang akan dikirimkannya itu berjumlah 45.500 Kg sedangkan sewaktu dilakukan penimbangan oleh pegawai Bea dan Cukai Jawatan di Belawan, ternyata semuanya berjumlah 48.154,75 Kg sehingga dengan demikian berselisih 2.654,75 Kg dari yang diberitahukan tertuduh kepada Pegawai Bea dan Cukai dengan pemberitahuan muat barang (PMB) tersebut diatas.

Kejahatan mana dirumuskan dan diancam dengan hukuman pasal 25, 26, 26b dari RO jo. Undang-Undang Darurat No. 7/ 1955 jo Undang-Undang Darurat No. 8/1958.

Menimbang bahwa tertuduh dipersidangan mungkir bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa untuk pengiriman seluruhnya dilaksanakan/diserahkan pengurusan-nya kepada EMKL Laut Djaja PT dan untuk itu segala surat-surat yang diperlukan diperbuat oleh PEM Laut PT tersebut ;

bahwa antara lain PT Embun Emas pernah mengirimkan hasil-hasil bumi dalam negeri dengan tiga gelombang dari Belawan ke Penang, pengiriman mana dilaksanakan oleh Pekerjaan Pengangkutan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dari PEM LAUT PT ;

bahwa pengiriman pertama adalah pada tanggal 3 Januari 1967 terdiri dari kopi biji kepunyaan PT Yalatrada sebanyak 187.068 Kg. netto, jumlah mana

diperoleh berdasarkan pemberitahuan dari Yalatrada sendiri ;

bahwa pengiriman kedua dilakukan pada tanggal 13 Pebruari 1967 terdiri dari kopi-biji Robusta sebanyak 100.000 Kg netto ;

bahwa dari pengiriman yang ketiga kalinya yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 1967 terdiri dari 350 keranjang jahe seberat 45.500 Kg netto ;

bahwa untuk setiap pengiriman-pengiriman tersebut diatas Pekerjaan Pengangkutan Ekspedisi Muatan Kapal Laut PEM LAUT JAYA lah yang membuat Pemberitahuan Muat Barang-nya, sesuai dengan prosedur yang ditentukan ;

bahwa ternyata kemudian timbul beberapa persoalan mengenai pengiriman pengiriman itu yaitu :

a. pada waktu pengiriman tertanggal 3 Januari dari separtaian kopi biji kepunyaan PT Yala Trada setelah ditimbang oleh Pegawai Bea/Cukai ternyata beratnya berlebih sebanyak 5.967,5 Kg dari jumlah yang disebutkan dalam Pemberitahuan Muat Barang ;

b. pengiriman tertanggal 13 Pebruari 1967, tertuduh mengirimkan lagi separtai kopi biji Robusta kepunyaan Yala Trada dan dengan perantaraan telepon memberitahukan kepada Ekspedisi Muatan Kapal Laut PT Laut Jaya supaya dibuatkan Pemberitahuan Muat Barang-nya 100.000 Kg kopi ;

bahwa setelah ditimbang oleh pegawai Bea/Cukai ternyata berlebih sebanyak 11.000 Kg ;

c. pengiriman tertanggal 2 Mei 1967, tertuduh mengirimkan lagi 45.500 Kg jahe kepunyaan tertuduh sendiri yang ditaruh dalam 350 keranjang, Ekspedisi Muatan Kapal Laut PT Laut Jaya membuat Pemberitahuan Muat Barangnya sebanyak 45.000 Kg berdasarkan pemberitahuan dari tertuduh sendiri dan setelah ditimbang oleh Pegawai Bea/Cukai di Belawan ternyata berlebih sebanyak 2.654,75 Kg dari yang disebutkan dalam Pemberitahuan Muat Barang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi diatas sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberitahukan sebagai berikut :

Saksi I Dahlan pegawai EMKL Laut Djaja ;

bahwa benar ada menguruskan surat-surat untuk pengiriman barang-barang ke Malaysia yaitu kopi dan jahe yang dikuasakan oleh tertuduh kepada EMKL PT Laut Jaya.

Dengan perantaraan telepon tertuduh memberitahukan jumlah dari barang-barang yang ada dikirimkan dan berdasarkan itu saksi membuat PMB (Pemberitahuan Muat Barang) ;

Saksi II M. Bebas, juru periksa pada Bea Cukai di Belawan :

Menerangkan bahwa dia ada ikut menimbang barang-barang berupa kopi biji yang akan dikirim ke Malaysia dan waktu ditimbang ternyata berlebih dari yang disebutkan dalam PMB

Mengenai kelebihan ini telah dilaporkan oleh saksi kepada atasannya ;

Saksi III Usman RS ;

Menerangkan bahwa yang diketahuinya dalam hal ini adalah mengenai pengiriman jahe saja yang mana dalam PMB beratnya tertulis sebanyak 45.500 Kg akan tetapi setelah ditimbang oleh saksi ternyata beratnya 48.154,75 Kg. bahwa jahe ini ditimbang tidak seluruhnya, hanya beberapa keranjang saja sebagai perbandingan (Proefsteek) dan mengenai kelebihannya ini dilaporkan kepada atasannya ;

Saksi IV Drs. Supardjo, Kepala Dinas Export Doane di Belawan :

menerangkan bahwa dia telah menerima laporan dari pegawainya bahwa barang-barang yang akan diexport keluar negeri oleh terdakwa setelah ditimbang ternyata berlebih dari yang disebut didalam PMB ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 1967 ketentuan mengenai denda schikking atas barang berlebih tidak berlaku oleh karena peraturan tersebut dicabut ;

Oleh karena kapal akan segera berangkat, barang-barang itu dimuat juga atas kebijaksanaan saksi dengan ketentuan bahwa Pihak Bea/Cukai telah mengambil tertuduh dan memberitahukan kepada tertuduh supaya membayar denda yang telah ditetapkan oleh Bea/Cukai ;

Menimbang bahwa saksi Bustaman tidak hadir, maka telah dibacakan keterangannya dalam pemeriksaan pendahuluan yang pada pokoknya menerangkan :

bahwa benar ada mengirimkan biji kopi keluar negeri, Malaysia, bahwa oleh karena dalam hal pengiriman barang-barang seperti ini, hanya pada waktu itu kepada PT Embun Emas saja diberi wewenang untuk mengexport keluar negeri, maka saksi sebagai Direktur PT Yala Trada telah menghubungi PT Embun Emas secara tertulis jumlahnya dari biji kopi yang akan dikirim itu sebanyak 2.011 goni.

bahwa persoalan pengangkutan, penimbangan dan juga mengenai mutunya saksi telah menyerahkan kepada PT Embun Emas untuk menelitinya, hingga dengan demikian PT Embun Emaslah yang bertanggung jawab atas pengiriman barang-barang tersebut ;

Menimbang bahwa tertuduh memungkiri kesalahan yang dituduhkan atas dirinya, tetapi mengakui ada mengirim keluar negeri kopi biji dan jahe sebanyak tiga kali ;

bahwa tertuduh dapat izin untuk mengexport hasil-hasil bumi ke Malaysia dari KOTI dan KOANDA Sumatera ;

bahwa pengiriman barang-barang keluar negeri ini tertuduh telah mengua-

sakan kepada EMKL PT Laut Djaja untuk menguruskan surat-suratnya termasuk PMBnya

bahwa tertuduh yang memberitahukan kepada EMKL/PT Laut Djaja mengenai berupa jumlah yang akan dikirim itu berdasarkan pemberitahuan itu EMKL Laut Jaya membuat PMB -nya ;

bahwa PT Yala Trada telah menyerahkan barang-barangnya untuk diexport itu kepada terdakwa dan segala sesuatunya mengenai pengiriman pengangkutan dan sebagainya adalah tanggung jawab dari terdakwa ;

bahwa tentang pengiriman-pengiriman hasil bumi dari Yala Trada yang diserahkan kepada PT Embun Emas, setelah ditimbang oleh Bea/Cukai ternyata berlebih dari yang disebutkan dalam masing-masing PMB nya. Pengadilan berpendapat bahwa tentang jumlah-jumlah yang berlebih itu tidak mungkin Yala Trada sebagai pedagang yang ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, menyerahkan barang-barangnya berlebih dari pada yang diberitahukan kepada PT Embun Emas ;

bahwa tertuduh seharusnya sebelum menyuruh membuat PMB nya kepada EMKL Laut Jaya lebih dahulu memeriksa dan menimbang apakah jumlah yang diberikan oleh PT Yala Trada itu cocok dengan yang diberitahukan ;

bahwa setelah diketahui oleh Bea/Cukai bahwa jumlah barang-barang yang akan diexport keluar negeri itu berbeda dengan yang disebutkan dalam PMB , maka tertuduh telah diberitahukan oleh pihak Pabean Bea/Cukai supaya tertuduh membayar saja dendanya dan barang dapat diberangkatkan ;

bahwa atas kebijaksanaan Kepala Bea/Cukai, barang-barang itu diberangkatkan juga, sedangkan denda belum dibayar oleh tertuduh ;

bahwa kalau sekiranya denda ini dibayar oleh tertuduh, perkara ini tidak sampai disidangkan ;

bahwa tertuduh mengatakan, bahwa tertuduh tidak mau membayar denda itu karena dirasanya terlalu tinggi ;

bahwa oleh karena itu kesalahan tertuduh tentang perbuatan tentang memberitahukan jumlah barang yang akan diexport tidak sesuai dengan PMB nya, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

bahwa oleh karena itu Pengadilan Ekonomi berpendapat supaya tertuduh R. Soetarmin tersebut harus dinyatakan bersalah tentang pembuatan itu, dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa perbuatan yang terbukti itu diatur dan diancam dengan hukuman dalam futsal 25, 26, 26b dan RO jo. Undang-Undang Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 9/1958 ;

Telah memperhatikan selain dari futsal-futsal tersebut diatas, juga memperhatikan futsal-futsal 1, 10, 14a 30 dan 103 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 9/1950 dan Bab II dari Reglemen

Indonesia yang diperbaharui juga Undang-Undang Darurat No. 7/1955 ;

MENGADILI :

Menerangkan, bahwa pesakitan, yang lebih lanjut tersebut di atas ini :

R. Soetarmin,

telah bersalah melakukan kejahatan :

"tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan yang sebenarnya dalam pemberitahuan umum sewaktu mengexport barang-barang hasil bumi dalam negeri sewaktu hendak diexport keluar negeri"

kejahatan mana dapat diancam dan dirumuskan dalam fatsal-fatsal : 25, 26, 26b dari RO jo. Undang-Undang Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 8/1958 ;

Menghukum dia oleh karena sedemikian dengan hukuman penjara lamanya 1 (satu) bulan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan 3 (tiga) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum, dan didenda sebesar Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Memerintahkan supaya sesudahnya persidangan ditutup, barang-barang bukti dalam perkara ini dilampirkan dalam berkas:

Menghukum pesakitan lagi menanggung membayar biaya perkara ini ;

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 21 September 1968 oleh Kita Akmar Ali, SH Hakim Ketua dan Bachtiar, SH M.O.M. Pardede, BA masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Mohd. Bachtiar Piliang, Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diumumkan oleh Hakim Ketua tersebut dipersidangan yang dinyatakan umum, dengan dihadiri oleh Jaksa tersebut dan pesakitan.